

Analisis Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan Aparatur dan Jabatan Studi Pada OPD Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Casri Tomi Mebri¹, Zakaria², Muh Yamin Noch³, Fahrudin Fasolo⁴, Yaya Sonjaya⁵

^{1, 2, 4} Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

^{3, 5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yapis Papua, Jayapura, Indonesia

²e-mail Korespondensi: zakariahatta15@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (explanatory research). Populasi penelitian terdiri dari 70 pegawai negeri sipil yang bertugas dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pada 35 OPD di Provinsi Papua. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh, sehingga seluruh populasi dijadikan responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Di antara variabel yang diteliti, pelatihan memberikan pengaruh yang paling dominan.

Implikasi Penelitian: Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual memerlukan penguatan kapasitas aparatur melalui pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan berkelanjutan, serta penempatan pegawai sesuai kompetensi dan tanggung jawab jabatan.

Kata Kunci: *Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pelatihan, Jabatan, Laporan Keuangan Berbasis Akrua.*

<https://journal.ppsuniyap.id/index.php/jmcb/issue/view/54>

Pendahuluan

Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri serta memenuhi kepentingan masyarakat daerah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan pada sistem pemerintahan tersebut berdampak besar terhadap penyelenggaraan dan ruang lingkup pemerintahan, yang juga memengaruhi sistem keuangan pemerintah daerah. Setiap pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya. Seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya keuangan yang dikelola dengan baik. Untuk itu, dengan penerapan prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah tentunya dapat mewujudkan sistem keuangan pemerintahan yang lebih baik.

Menurut PP 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas berbasis akrual. Bagi pemerintah daerah, menyusun laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu keharusan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan daerah yang mencakup tertib administrasi serta kepatuhan terhadap asas-asas yang berlaku. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa, yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar serta berkualitas. Dalam lima tahun terakhir, secara keseluruhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan.

Pada 2016, 378 LKPD (70%) meraih opini WTP, dan pada 2020 menjadi 486 LKPD (90%). Peningkatan kualitas LKPD tersebut terjadi karena Pemda telah melakukan perbaikan, antara lain melakukan inventarisasi aset tetap dan mencatat hasil inventarisasi tersebut, serta melakukan pengembalian dana atas ketekoran kas dan kelebihan pembayaran atas belanja modal serta belanja barang dan jasa. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021, BPK memeriksa 541 LKPD Tahun 2020 dari 542 pemda. Satu Pemda belum menyampaikan LKPD tahun 2020 (unaudited) kepada BPK untuk diperiksa, yaitu Pemerintah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua.

Berdasarkan tingkat pemerintahan, 33 dari 34 (97%) LK pemerintah provinsi memperoleh opini WTP, 365 dari 415 (88%) LK pemerintah kabupaten memperoleh opini WTP, dan 88 dari 93 (95%) LK pemerintah kota memperoleh opini WTP. "Capaian opini tersebut telah melampaui target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, masing-masing sebesar 91%, 77%, dan 91% pada tahun 2020," jelas Ketua BPK. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa terdapat 55 LKPD yang belum memperoleh opini WTP. Penyebabnya, masih ditemukan ketidaksesuaian LKPD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) atau ketidakcukupan bukti pendukung atas kewajaran LKPD. Secara umum, permasalahan penyajian laporan keuangan terjadi, antara lain, pada akun aset lancar, aset tetap, dan belanja modal. Dari 55 pemda yang belum memperoleh opini WTP, terdapat 10 pemda yang memiliki permasalahan.

Salah satu fenomena yang terjadi di Pemerintah Provinsi Papua adalah bahwa di tengah pandemi covid-19, Pemerintah Provinsi Papua kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk 5 kali berturut-turut, sehingga totalnya menjadi 8 kali meraih WTP. Terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Meraih WTP bukan berarti tanpa catatan. Ada beberapa rekomendasi yang diberikan oleh BPK dan itu tentunya menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti. Untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dianggap perlu diperbaiki, diperlukan pelatihan bagi semua pihak yang terkait. <http://kabarpapua.co.id> (2021).

Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2004, pemberian opini LKPD didasarkan pada 4 kriteria, yaitu (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (2) kecukupan pengungkapan; (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Berdasarkan pemeriksaan BPK yang dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK menyimpulkan bahwa opini atas LKPD Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pusat Informasi dan Komunikasi: papua-ppid.bpk.go.id.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di pemerintah daerah. Penelitian yang menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah yaitu penelitian Setiawan dan Ras (2021) tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Pegawai terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, serta penelitian Arum dan Nuraini (2021)

tentang pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kota Bogor. Secara garis besar, para pengguna laporan keuangan dan penyusun laporan keuangan beranggapan bahwa perubahan dari basis kas menjadi basis akrual akan memberikan informasi yang lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan manajemen entitas.

Terdapat fenomena dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, yaitu adanya kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah. Masalah yang paling mendasar yaitu terkait sumber daya manusia di pemerintah daerah yang kurang memadai dalam pengelolaan keuangan. Sumber daya manusia memiliki peran penting yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Penerapan sistem baru secara otomatis akan mengakibatkan perubahan pola kerja dan perubahan dalam proses bisnis institusi. Resistensi akan muncul karena pegawai sudah terbiasa dan nyaman dengan kondisi saat ini. Salah satu kunci keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual adalah tingkat penerimaan karyawan terhadap sistem baru (Mahat dan Ali, 2014).

Dalam penerapan SAP berbasis kas menuju akrual, banyak kendala yang ditemui, seperti kurangnya pemahaman staf dalam menyusun laporan keuangan (Satrio, 2016). Penerapan standar dalam sistem akuntansi merupakan hal yang penting karena laporan keuangan tidak mungkin dikategorikan berkualitas jika dalam proses pembuatannya tidak mengikuti sistem akuntansi yang sesuai. Seperti yang diungkapkan Mahadi *et al.* (2017), jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja aparatur desa terhadap pemahaman laporan keuangan desa sudah pernah dilakukan oleh Sasha Mursina dan Rahmawaty (2017) yang menemukan bukti empiris bahwa tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Tinjauan Pustaka

Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

Pertimbangan penerapan SAP berbasis akrual adalah untuk memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap dibandingkan basis lainnya, terutama terkait informasi piutang dan utang pemerintah. Laporan keuangan berbasis akrual menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan. Akuntansi berbasis akrual diyakini dapat memberikan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang. Informasi keuangan yang dihasilkan berdasarkan basis akrual dapat mengurangi peluang terjadinya kecurangan dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja serta mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

Akuntabilitas Keuangan Daerah Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seorang pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat serta dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Sisdiknas, 2003). Mangkunegara (2002) mengemukakan: “Pendidikan adalah suatu kegiatan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi, di mana pegawai manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Dan pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan kemampuan teknis dalam tujuan terbatas”

Pengalaman Kerja

Menurut Handoko (2014), pengalaman kerja merupakan penguasaan pengetahuan dan keterampilan karyawan yang diukur dari lama masa kerja serta tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki karyawan. Pengalaman hanya bisa didapatkan di tempat kerja. Sedangkan menurut Sutrisno (2018), pengalaman kerja merupakan dasar/acuan bagi seorang karyawan untuk menempatkan diri secara tepat dalam kondisi, berani mengambil risiko, mampu menghadapi tantangan dengan penuh tanggung jawab, serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak untuk tetap menjaga produktivitas dan kinerja, sehingga menghasilkan individu yang kompeten di bidangnya.

Pengalaman kerja merupakan modal karyawan itu sendiri, terdiri dari kemampuan yang didapat melalui suatu proses pembentukan dan keterampilan yang dimiliki karyawan dalam menjalankan tugas yang diembannya (Situmeang, 2017). Menurut Zainullah (2019), pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun nonformal yang dapat diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang pada suatu pola tingkah laku yang lebih baik.

Pelatihan

Handoko (2012) yang dimaksudkan latihan (*training*) untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Menurut Rivai (2015), pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori.

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 64 Tahun 2013 tentang [Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua](#) pada Pemerintah Daerah. Untuk dapat mengimplementasikan secara konsisten SAP Berbasis Akrua, dibutuhkan SDM pengelolaan keuangan negara yang andal dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan tentang penyusunan laporan keuangan sesuai SAP Berbasis Akrua, yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Aparatur Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.

Pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat mencapai sasaran dan tujuan dalam upaya meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang mengikuti prinsip-prinsip *good governance* serta sesuai dengan peraturan dan sistem yang berlaku. Kemampuan yang diharapkan adalah dapat menyusun laporan keuangan SKPD (Badan, Dinas), laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan konsolidasian (laporan keuangan pemerintah daerah). Pelatihan diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah dengan melibatkan pegawai pemerintah daerah yang menangani akuntansi keuangan daerah atau yang diproyeksikan untuk menangani akuntansi keuangan daerah.

Jabatan

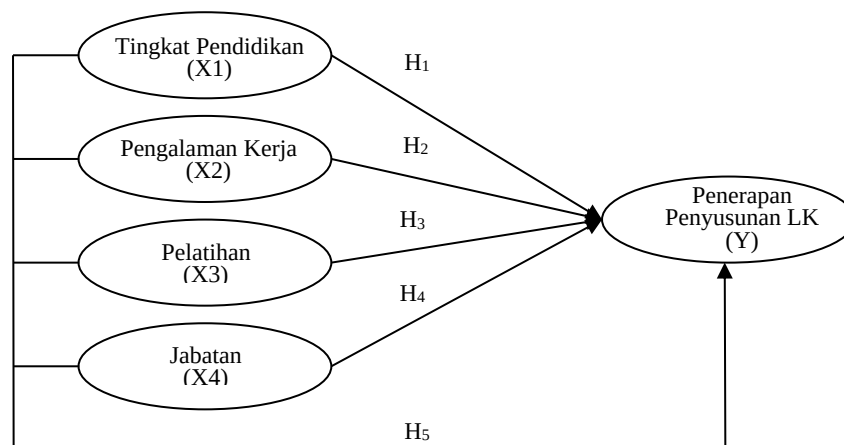
Jabatan adalah lingkungan kerja tetap yang bersifat abstrak, dengan fungsi tertentu, yang secara keseluruhan mencerminkan kegiatan organisasi. Sifat abstrak dari sebuah jabatan mengharuskan adanya pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab agar jabatan tersebut dapat menjadi konkret dan fungsinya dapat dijalankan (Manan, 2020). Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi.

Jabatan menggambarkan tuntutan pekerjaan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai. Dengan ditetapkan standar minimum, diharapkan perusahaan memiliki pegawai yang berkualitas dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sehingga efisiensi dan efektivitas kerja dapat tercapai. Adapun pengertian spesifikasi jabatan sebagai berikut : Menurut Moekijat (2010), “jabatan adalah suatu keterangan tentang syarat-syarat orang minimum yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu jabatan dengan baik”. Menurut Marwansyah (2012), “Spesifikasi jabatan adalah kualifikasi atau persyaratan minimum yang harus dimiliki oleh seseorang agar ia dapat melakukan pekerjaan tertentu.

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan seluruh kegiatan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang dinamis pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian terdahulu. Kerangka konseptual yang diajukan dalam penelitian ini meliputi budaya organisasi, lingkungan kerja, dan kepemimpinan transformasional sebagai variabel independen, serta kinerja personel sebagai variabel dependen. sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara atas masalah yang dirumuskan atau sejalan dengan tujuan penelitian. Hipotesis akan menekankan hubungan yang diharapkan antara variabel independen dan variabel dependen. Jawaban yang bersifat sementara ini akan diteliti hingga terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Dari kerangka konseptual di atas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Penerapan laporan keuangan berbasis akrual memerlukan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang akuntansi pemerintahan. Tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi kemampuan aparatur dalam memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual secara tepat. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki aparatur, semakin baik pula pemahaman dan kompetensinya dalam menyusun laporan keuangan yang relevan, andal, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian Andini dan Yusrawati (2015) menunjukkan bahwa keterbatasan aparatur yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dapat menghambat pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua.

Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Pengalaman kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Semakin lama seseorang bekerja, semakin banyak pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang diperoleh terkait proses pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Aparatur yang memiliki pengalaman kerja yang memadai cenderung lebih mampu mengidentifikasi kesalahan, memahami permasalahan, serta menentukan solusi yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan. Purnamasari (2012) menyatakan bahwa pengalaman kerja yang tinggi memberikan keunggulan dalam mendeteksi, memahami, dan mengatasi kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pengalaman Kerja Berpengaruh Terhadap Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua.

Pengaruh Pelatihan Terhadap Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Pelatihan merupakan salah satu upaya penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi aparatur dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Melalui pelatihan yang memadai, aparatur dapat memahami prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan, prosedur penyusunan laporan keuangan, serta penerapan standar akuntansi yang berlaku. Semakin efektif pelatihan yang diberikan, semakin tinggi kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, andal, dan sesuai dengan ketentuan. Baswir (2017) menyatakan bahwa pelatihan yang memadai berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerapan sistem akuntansi karena meningkatkan pemahaman dalam merancang, menerapkan, dan menggunakan sistem tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Pelatihan Berpengaruh Terhadap Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua.

Pengaruh Jabatan Berpengaruh Terhadap Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua

Jabatan dalam pengelolaan keuangan daerah menunjukkan tingkat tanggung jawab, kewenangan, dan keterlibatan aparatur dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah. Aparatur yang menduduki jabatan terkait pengelolaan keuangan memiliki peran strategis dalam memastikan penerapan akuntansi berbasis akrual berjalan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat keterlibatan dan tanggung jawab jabatan dalam pengelolaan keuangan, semakin besar pula pemahaman dan kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Kristiawati (2015) menemukan bahwa keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akrual masih dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pejabat pengelola keuangan terhadap sistem akuntansi yang diterapkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Jabatan Berpengaruh Terhadap Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual.

Pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan dan jabatan secara simultan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual

Penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, pemahaman, dan kemampuan yang memadai dalam pengelolaan keuangan daerah. Tingkat pendidikan memberikan dasar pengetahuan konseptual, pengalaman kerja memperkuat keterampilan teknis dan kemampuan pemecahan masalah, pelatihan meningkatkan pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintahan, sedangkan jabatan mencerminkan tingkat tanggung jawab dan keterlibatan aparatur dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Sinergi keempat faktor tersebut diyakini dapat meningkatkan kemampuan aparatur dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual secara efektif, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitian Arum dan Nuraini (2021) serta Lestari dan Rahayu (2020) menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan dan jabatan berpengaruh secara simultan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (explanatory research) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua. Penelitian eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antarvariabel melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2013). Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian.

Populasi penelitian terdiri atas 70 pegawai negeri sipil yang berasal dari 35 OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan memiliki tugas dalam pengelolaan serta penyusunan laporan keuangan daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh (saturated sampling), sehingga seluruh anggota populasi dijadikan responden (Sugiyono, 2017). Variabel independen yang diteliti meliputi tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan, sedangkan variabel dependen adalah penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 26.0. Sebelum pengujian hipotesis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen (Supardi, 2015; Triton, 2016), serta uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen dan uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada tingkat signifikansi 5% (Ghozali, 2018).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Dari hasil analisis deskriptif variabel penelitian ini, diperoleh tingkat pendidikan (X_1) dengan nilai rata-rata sebesar 3,5170 dan standar deviasi sebesar 0,76182. Pengalaman kerja (X_2) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 3,5799 dengan standar deviasi sebesar 0,76609. Pelatihan (X_3) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 3,6390 dengan standar deviasi sebesar 0,74681. Jabatan (X_4) menunjukkan bahwa nilai rata-rata sebesar 3,7478 dengan standar deviasi sebesar 0,73377. Nilai rata-rata penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual (Y) adalah sebesar 3,6007 dengan standar deviasi sebesar 0,62150. Nilai *Descriptive Statistics* yang diperoleh dapat dilihat pada berikut:

Tabel 1. Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Tingkat Pendidikan	69	3,5170	0,76182
Pengalaman Kerja	69	3,5799	0,76609
Pelatihan	69	3,6390	0,74681
Jabatan	69	3,7478	0,73377
Penerapan Penyusunan LK	69	3,6007	0,62150
Valid N (listwise)	69		

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Berdasarkan hasil uji validitas untuk diketahui bahwa semua butir pernyataan untuk variabel tingkat pendidikan (X_1), pengalaman kerja (X_2), pelatihan (X_3), jabatan (X_4) dan variabel penerapan penyusunan laporan keuangan (Y) menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dari setiap variabel penelitian memiliki nilai korelasi *product moment* atau nilai r hitung lebih besar dari nilai kritis r tabel atau $R_{\text{Hitung}} > R_{\text{Tabel}}$ dengan $\alpha = 0,05$ atau 5% dan *Corrected Item-Total Correlation* masing-masing indicator $> 0,1968$, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan penelitian valid.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item	R_{Hitung}	R_{Tabel}	Sig	Ket
Tingkat Pendidikan (X_1)	$X_{1.1}$	0,926	0,1968	0,000	Valid
	$X_{1.2}$	0,889	0,1968	0,000	Valid
	$X_{1.3}$	0,926	0,1968	0,000	Valid
	$X_{1.4}$	0,915	0,1968	0,000	Valid
	$X_{1.5}$	0,896	0,1968	0,000	Valid
	$X_{1.6}$	0,743	0,1968	0,000	Valid
Pengalaman Kerja (X_2)	$X_{2.1}$	0,909	0,1968	0,000	Valid
	$X_{2.2}$	0,899	0,1968	0,000	Valid
	$X_{2.3}$	0,889	0,1968	0,000	Valid
	$X_{2.4}$	0,918	0,1968	0,000	Valid
	$X_{2.5}$	0,909	0,1968	0,000	Valid
	$X_{2.6}$	0,909	0,1968	0,000	Valid
Pelatihan (X_3)	$X_{3.1}$	0,918	0,1968	0,000	Valid
	$X_{3.2}$	0,727	0,1968	0,000	Valid
	$X_{3.3}$	0,915	0,1968	0,000	Valid
	$X_{3.4}$	0,896	0,1968	0,000	Valid
	$X_{3.5}$	0,902	0,1968	0,000	Valid
	$X_{3.6}$	0,813	0,1968	0,000	Valid
	$X_{3.7}$	0,915	0,1968	0,000	Valid
	$X_{3.8}$	0,896	0,1968	0,000	Valid
Jabatan (X_4)	$X_{3.9}$	0,902	0,1968	0,000	Valid
	$X_{4.1}$	0,551	0,1968	0,000	Valid

Variabel	Item	R _{Hitung}	R _{Tabel}	Sig	Ket
Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan (Y)	X _{4.2}	0,896	0,1968	0,000	Valid
	X _{4.3}	0,858	0,1968	0,000	Valid
	X _{4.4}	0,815	0,1968	0,000	Valid
	X _{4.5}	0,811	0,1968	0,000	Valid
	Y ₁	0,831	0,1968	0,000	Valid
	Y ₂	0,795	0,1968	0,000	Valid
	Y ₃	0,840	0,1968	0,000	Valid
	Y ₄	0,874	0,1968	0,000	Valid
	Y ₅	0,891	0,1968	0,000	Valid
	Y ₆	0,906	0,1968	0,000	Valid
	Y ₇	0,890	0,1968	0,000	Valid

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

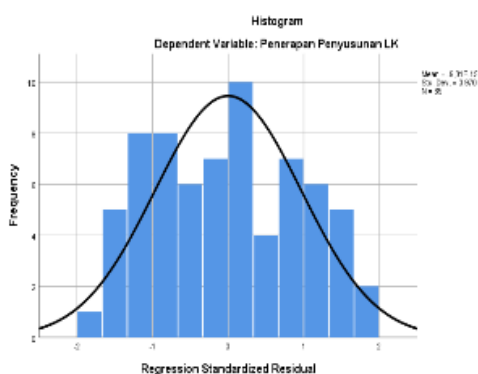
Hasil uji reliabilitas pada masing-masing variabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* > 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0,80. Hasil analisis uji reliabilitas dari setiap pertanyaan dengan menggunakan program SPSS versi 26.0, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

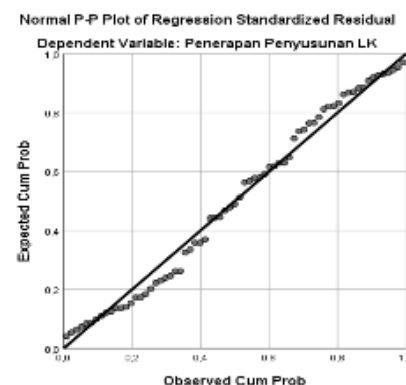
Variabel	No Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tingkat Pendidikan (X ₁)	6	0,784	Reliabel
Pengalaman Kerja (X ₂)	6	0,788	Reliabel
Pelatihan (X ₃)	9	0,837	Sangat Reliabel
Jabatan (X ₄)	5	0,794	Reliabel
Penerapan Penyusunan LK (Y)	7	0,797	Reliabel

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal dan model regresi layak digunakan dalam penelitian ini. Pada gambar grafik Normal P-P Plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, sehingga memenuhi asumsi normalitas.



Gambar 1. Histogram Normalitas



Gambar 2. Normal Plot Regresi

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Hasil Uji multikolineritas menunjukan nilai *tolerance* Tingkat Pendidikan (X₁) sebesar 0,123, Pengalaman Kerja (X₂) sebesar 0,131, Pelatihan (X₃) sebesar 0,866 dan Jabatan (X₄) sebesar 0,565 dimana tingkat toleransi dari masing-masing variabel tersebut lebih besar dari 0,10 sedangkan nilai VIF Tingkat Pendidikan (X₁) sebesar 8,162, Pengalaman Kerja (X₂) sebesar 7,632, Pelatihan (X₃) sebesar

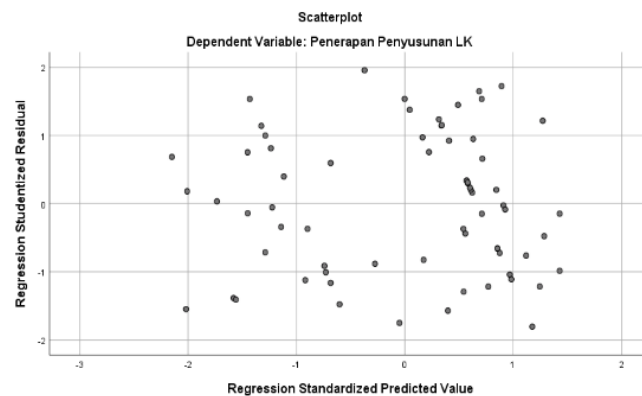
1,155 dan Pelatihan (X_3) sebesar 1,1770, maka dapat disimpulkan bahwa dari masing-masing variabel independen memiliki nilai ≤ 10 , dimana dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,50, hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		<i>Tolerance</i>	VIF
(Constant)			
1	Tingkat Pendidikan (X_1)	,123	8,162
	Pengalaman Kerja (X_2)	,131	7,632
	Pelatihan (X_3)	,866	1,155
	Jabatan (X_4)	,565	1,770

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Hasil grafik scatterplot tidak menunjukkan pola yang jelas dan terlihat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y dari masing-masing variabel bebas, sehingga tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Jika terjadi pola yang acak atau tersebar, maka tidak ada heteroskedastisitas. Pada gambar grafik *scatterplot* ditunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Uji t

Variabel	Unstandardized Coefficients		T _{hitung}	Sig
	(B)	Standar error		
(Constant)	,298	,138	2,164	,034
Tingkat Pendidikan (X_1)	,443	,080	5,552	,000
Pengalaman Kerja (X_2)	,463	,077	6,036	,000
Pelatihan (X_3)	,724	,031	23,649	,000
Jabatan (X_4)	,152	,039	3,943	,000

Sumber: Olah Data 2023, SPSS 26.0 for windows

Berdasarkan tabel di atas, dapat diperoleh model persamaan regresi $Y = 0,298 + 0,443X_1 + 0,463X_2 + 0,724X_3 + 0,152X_4 + e$. Dari hasil model, persamaan ini menunjukkan interpretasi sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar 0,298 menunjukkan arah positif. Hal ini mengandung makna bahwa penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan OPD Pemerintahan Provinsi Papua meningkat sebesar 0,298 satuan atau sebesar 28,9% tanpa dipengaruhi oleh variabel tingkat pendidikan (X_1), pengalaman kerja (X_2), pelatihan (X_3), dan jabatan (X_4).

Nilai koefisien regresi variabel tingkat pendidikan (X_1), sebesar 0,443, memiliki arah positif, yang mengandung makna bahwa apabila tingkat pendidikan meningkat satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di OPD Pemerintahan Provinsi Papua sebesar 0,443 satuan atau sebesar 44,3% dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.

Nilai koefisien regresi variabel pengalaman kerja (X_2) sebesar 0,463 memiliki arah positif, yang mengandung arti bahwa apabila pengalaman kerja meningkat sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan OPD Pemerintahan Provinsi Papua sebesar 0,463 satuan atau sebesar 46,3% dengan asumsi bahwa nilai variabel lainnya tetap.

Nilai koefisien regresi variabel pelatihan (X_3) sebesar 0,724 memiliki arah positif, yang mengandung arti bahwa apabila variabel pelatihan meningkat sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di OPD Pemerintahan Provinsi Papua sebesar 0,724 satuan atau sebesar 72,4% dengan asumsi bahwa variabel lainnya tetap.

Nilai koefisien regresi variabel jabatan (X_4) sebesar 0,152 memiliki arah positif, yang mengandung arti bahwa apabila variabel jabatan meningkat sebesar satu satuan, maka akan berdampak pada peningkatan penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan OPD Pemerintahan Provinsi Papua sebesar 0,152 satuan atau sebesar 15,2% dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

Variabel tingkat pendidikan (X_1) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan perolehan t hitung sebesar 5,552, dengan t tabel 1,9945 atau $5,552 > 1,9945$ serta arah positif. Berdasarkan hasil analisis tersebut, H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, variabel tingkat pendidikan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Papua. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima.

Variabel pengembangan SDM (X_2) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan perolehan t hitung sebesar 6,036, dengan t tabel 1,9945 atau $6,036 > 1,9945$. Berdasarkan hasil analisis tersebut, H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, variabel pengalaman kerja (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Papua. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis Kedua diterima.

Variabel pelatihan (X_3) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan perolehan T_{hitung} sebesar 23,649 dimana T_{Tabel} 1,9945 atau $23,649 > 1,9945$, berdasarkan hasil analisis tersebut maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dengan demikian variabel pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap dan merupakan variabel yang paling dominan dalam penelitian ini dibanding dengan variabel lain dan merupakan variabel yang paling dominan memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dibanding dengan variabel lain sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis ketiga diterima.

Variabel jabatan (X_4) memperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan perolehan t hitung sebesar 3,943, dengan t tabel 1,9945 atau $3,943 > 1,9945$. Berdasarkan hasil analisis tersebut, H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, variabel jabatan (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Papua. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat diterima.

Hasil analisis menggunakan program SPSS versi 26.0 for Windows pada Tabel 5.19 menunjukkan nilai F hitung sebesar $197,541 > 2,7826$, sedangkan nilai sig (*p-value*) sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan $0,000 < 0,05$ nilai (sig) = $0,000 < \alpha$ yang dipersyaratkan (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan (X_1), pengalaman kerja (X_2), pelatihan (X_3) dan jabatan (X_4) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan OPD Pemerintahan Provinsi Papua

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Adjusted R^2 sebesar 0,92, hal ini menunjukkan bahwa persentase kontribusi pengaruh variabel independen tingkat pendidikan (X_1), pengalaman kerja (X_2), pelatihan (X_3) dan jabatan (X_4) terhadap variabel dependen penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan OPD Pemerintahan Provinsi Papua sebesar 92,00%. Sedangkan sisanya 8,00% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, seperti; kompetensi, kualitas laporan keuangan, pengendalian internal, sistem informasi, penggunaan teknologi informasi, fasilitas kerja, kompensasi dan variabel-variabel lain.

Pembahasan.

Pengaruh tingkat pendidikan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan seorang pegawai dalam mengimplementasikan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi kompetensi seorang pegawai dalam memahami peraturan dan ketentuan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku di pemerintahan.

Hasil analisis dan observasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penempatan pegawai di bagian keuangan pada OPD Pemerintah Provinsi Papua sudah sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki. Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih cepat memahami pekerjaan dan tanggung jawabnya serta mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Pegawai yang memahami prosedur pencatatan standar akuntansi berbasis akrual lebih mengerti proses-proses akuntansi, mulai dari penjurnalan hingga tahapan penyusunan laporan keuangan, dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Arum dan Nuraini (2021), yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan UMKM di Kota Bogor, serta penelitian Romandhon (2019) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Dalam upaya meningkatkan penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, masing-masing OPD pemerintah provinsi Papua diharapkan untuk terus melakukan implementasi dan sosialisasi penerapan SAP berbasis akrual secara konsisten, dengan dukungan sumber daya manusia yang menguasai bidang akuntansi dan keuangan. Masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM melalui pengembangan pendidikan pegawai, baik formal maupun nonformal, serta pemberian peluang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi yang berkaitan dengan bidang dan pekerjaannya.

Pengaruh pengalaman kerja terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Hasil pengujian hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada OPD Pemerintah Provinsi Papua. Penyajian laporan keuangan berbasis akrual yang berkualitas dihasilkan oleh sumber

daya manusia yang memiliki pemahaman dan pengalaman kerja di bidang akuntansi serta memahami standar pencatatan akuntansi yang baik. Seorang pegawai yang mampu menyusun dan menyelesaikan laporan keuangan dengan baik dipengaruhi oleh kemampuan, kecakapan, pengalaman, dan keterampilan. Pengalaman masa lalu akan sangat berguna untuk mendukung pengetahuan yang dimiliki apabila seseorang menghadapi masalah baru dalam penyusunan laporan keuangan. Secara psikologis, pegawai yang belum matang dalam menjalankan tugas baru akan memerlukan waktu lebih lama untuk memahami dan menyelesaikan pekerjaannya. Pengalaman merupakan pelajaran yang akan menghasilkan perubahan ke arah kematangan tingkah laku, pemahaman, pengertian serta pengajaran informasi.

Penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh kapabilitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Salah satu kapabilitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pemahaman dan pengalaman kerja yang dimiliki. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang keuangan pemerintahan, telah dikeluarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Pemerintah diwajibkan menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan berkaitan dengan sumber daya manusia dan sistem akuntansi. Sumber daya manusia dan sistem akuntansi tidak dapat dipisahkan karena sumber daya manusia berperan dalam menjalankan operasional sistem akuntansi. Penggunaan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menuntut adanya sumber daya manusia yang kompeten, dengan pengalaman dan pemahaman yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan untuk menjalankan standar akuntansi pemerintah daerah, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Papua, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagai SOP dalam penyusunan laporan yang berlaku bagi seluruh organisasi perangkat daerah di Provinsi Papua. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang baik dalam penyajiannya akan memengaruhi opini yang diberikan BPK atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. Faktor utama yang sangat diperlukan untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar adalah kompetensi sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan pengalaman, didukung oleh tersedianya fasilitas dan peralatan kerja, seperti komputer dan aplikasi, yang dapat membantu dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Arum dan Nuraini (2021) yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas penyajian laporan keuangan UMKM di Kota Bogor, serta penelitian yang dilakukan Romandhon (2019) yang menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Papua dapat dikatakan sudah baik dengan menempatkan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman di bidang akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pengaruh pelatihan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Berdasarkan hasil analisis, pelatihan memberikan dampak/pengaruh terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Romandhon (2019). Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan desa, yang didukung oleh penelitian Sukriani (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Bumdes di Kecamatan Negara.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa upaya pemerintah provinsi Papua dalam meningkatkan pemahaman serta penerapan laporan keuangan berbasis akrual terus dilakukan melalui kegiatan pelatihan, dalam setiap tahun sedikitnya dilaksanakan 2 kali kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual pada pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah provinsi Papua terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hasil penelitian ini mengisyaratkan bahwa semakin sering pegawai mengikuti kegiatan pelatihan, terutama pada bidang keuangan, akan memberikan dampak positif bagi pegawai dalam memahami dan menerapkan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan baik dan benar sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semakin sering pegawai mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan daerah, semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan oleh masing-masing OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Pengaruh pelatihan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada OPD di Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan sebagai pengelola keuangan daerah telah dijalankan dengan baik. Tanggung jawab sebagai pembuat laporan keuangan adalah benar-benar memahami proses penyusunan laporan keuangan. Sebagai pejabat, tidak hanya mengesahkan hasil laporan keuangan, tetapi juga terlibat dalam proses penyusunan laporan keuangan di masing-masing OPD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah dapat melaksanakan tugasnya dalam pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wungow (2018) yang menunjukkan bahwa tingkat jabatan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Berdasarkan hasil analisis dan observasi, implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sangat dipengaruhi oleh kemampuan seseorang dalam menjalankan jabatan sebagai pengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat.

Pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan kewajiban setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pemegang kewenangan pengelolaan anggaran berdasarkan asas umum pengelolaan keuangan daerah. Pada tingkat OPD, pengelola keuangan meliputi Pengguna Anggaran (PA), Pejabat struktural eselon III selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat struktural eselon IV selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara pengeluaran, dan bendahara pengeluaran pembantu, yang bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya. Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pejabat sebagai penanggung jawab dan pengendalian intern pada masing-masing OPD dapat melaksanakan proses pengawasan dan pengelolaan secara berkesinambungan agar pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan rencana serta peraturan perundang-undangan.

Pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan dan jabatan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Papua memiliki pengaruh dan kontribusi yang sangat besar, yaitu sebesar 92%, dalam upaya penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Peningkatan kompetensi melalui kegiatan pelatihan menjadi variabel yang paling dominan dalam penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Hasil penelitian secara simultan konsisten dengan penelitian yang dilakukan sejalan dengan penelitian yang dilakukan penelitian Romandhon (2019) penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan desa didukung oleh penelitian Sukriani (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelatihan, dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bumdes Di Kecamatan Negara serta penelitian Wungow (2018) yang menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan, Masa Kerja, Pelatihan dan Jabatan secara simultan berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

Untuk menjaga eksistensi penyajian laporan keuangan berbasis SAP akrual, kompetensi Sumber Daya Aparatur harus terus ditingkatkan, baik secara kuantitas maupun kualitas, melalui pemberian peluang bagi pegawai untuk meningkatkan jenjang pendidikan dan keikutsertaan dalam kegiatan pelatihan bidang keuangan dan anggaran, mengurangi tingkat mutasi sehingga pegawai memiliki pemahaman dan pengalaman kerja yang memadai, serta penempatan dan promosi jabatan yang sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan.

Penempatan pegawai yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya sangat berpengaruh terhadap output yang dihasilkan. Alfiandri (2013). Sangat penting untuk menempatkan SDM yang potensial, bertanggung jawab, serta memiliki kompetensi yang memadai, baik secara teknis maupun administratif, dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan menjadi indikator yang menunjukkan derajat intelektualitas seorang pegawai, sehingga ia akan lebih mudah melaksanakan tugasnya dalam mengelola keuangan dengan baik dan akuntabel.

Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan berpengaruh positif terhadap penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua. Secara parsial maupun simultan, keempat variabel tersebut terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan aparatur dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan merupakan faktor yang paling dominan dalam mendukung keberhasilan implementasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh sistem dan regulasi yang berlaku, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan formal, pengembangan pengalaman kerja, pelaksanaan pelatihan berkelanjutan, serta penempatan pegawai sesuai kompetensi dan tanggung jawab jabatan agar penerapan akuntansi berbasis akrual dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Penelitian ini dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua dengan jumlah responden yang relatif terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini hanya mengkaji faktor tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan jabatan. Namun, masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual, seperti kompetensi aparatur, sistem informasi akuntansi, dukungan teknologi informasi, budaya organisasi, sistem pengendalian internal, serta variabel lain yang memengaruhi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai faktor-faktor sumber daya manusia yang memengaruhi penerapan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di sektor publik. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, meningkatkan jumlah responden, serta menambahkan variabel lain seperti kompetensi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, dan kualitas sistem akuntansi keuangan daerah guna memperoleh model yang lebih komprehensif dalam menjelaskan keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. L. P. R., & Dewi, S. K. (2019). Pengaruh pengalaman kerja, prestasi kerja, dan pelatihan terhadap pengembangan karier karyawan. *E-Jurnal Manajemen*, 8(7), 4073–4101. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i07.p03>
- Anwar, P. M. (2003). *Perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia*. Refika Aditama.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik (Edisi revisi)*. Rineka Cipta.
- Arum, S., & Nuraini, A. (2021). Pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan kompetensi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan UMKM di Kota Bogor. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 441–450. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.927>
- Asih, D. A. T. (2006). Pengaruh pengalaman terhadap peningkatan keahlian auditor dalam bidang auditing (Skripsi). Universitas Islam Indonesia.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar (Edisi ke-3)*. Erlangga.
- Dewi, D. K. R. (2016). Pengaruh tingkat pendidikan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Sinar Niaga Sejahtera Cabang Singaraja. *Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(1), 1–10. <https://ejournal.undiksha.ac.id>
- Djauzak, A. (1994). *Peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana pembangunan bangsa*. Balai Pustaka.
- Erlina & Rasdianto. (2013). *Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual*. Brama Ardian.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi analisis multivariat menggunakan program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Salemba Empat.
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Bumi Aksara.
- Henukh, I. T., dkk. (2020). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 1(2). <https://ejurnal.undana.ac.id>
- Kamemy, L. (2017). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan akuntansi akrual pada Pemerintah Provinsi Riau (studi empiris pada SKPD Provinsi Riau). *JOM Fekon*, 4(1). <https://jom.unri.ac.id>
- Khurotin, N., & Afrianty, T. W. (2018). Analisis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di PT Beon Intermedia Cabang Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 64(1), 195–203. <https://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>

- Kriyantono, R. (2012). Public relations & crisis management: Pendekatan critical public relations, etnografi kritis dan kualitatif. Kencana.
- Lestari, D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh penerapan SAP berbasis akrual terhadap pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 3(2), 75–88. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2207>
- Mandang, E. F., Lumanauw, B., & Walangitan, M. D. B. (2017). Pengaruh tingkat pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 5(3), 4324–4335. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Mardiana, R., & Fahlevi, H. (2017). Pengaruh pemahaman akuntansi, pengendalian internal dan efektivitas penerapan SAP berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(2), 30–38. <https://jim.usk.ac.id>
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor publik. Andi Offset.
- Mulyawati. (2008). Pengaruh pendidikan dan pengalaman kerja. Pustaka.
- Octavianus, W. R., & Adolfini. (2018). Pengaruh pengalaman kerja dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan PT Telkom Indonesia Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 6(3), 1758–1767. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Parananda, B. H. (2016). Pengaruh pemahaman akuntansi, tingkat pendidikan, dan lama masa kerja terhadap penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 16(1), 47–59. <https://journals.ums.ac.id>
- Rachmawati, I. K. (2008). Manajemen sumber daya manusia. Andi Offset.
- Romandhon. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pengalaman kerja aparatur desa, dan fasilitas kantor terhadap pemahaman laporan keuangan desa. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 2(1). <https://doi.org/10.32500/jematech.v2i1.578>
- Sari, D., & Putra, H. S. (2012). Menelisik akuntansi pemerintahan berbasis akrual. *JEAM (Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen)*, 11(2), 33–56.
- Sari, N., & Wardani, R. (2015). Pengelolaan dan analisis data statistik dengan SPSS (Edisi 1). Deepublish.
- Sedarmayanti. (2009). Sumber daya manusia dan produktivitas kerja. Mandar Maju.
- Setiawan, I. M. H., & Ras, N. K. (2021). Penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kualitas pegawai terhadap kualitas laporan keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1331–1343. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i05.p19>
- Sousa, R. G., Vasconcelos, A. F., Caneca, R. L., & Niyama, J. K. (2012). Accrual basis accounting in the Brazilian public sector: Empirical research on the usefulness of accounting information. 12th USP Congress of Controllershship and Accounting. <https://congressousp.fipecafi.org>
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sukriani, L., Herawati, N. T., & Sulindawati, N. L. G. E. (2018). Pengaruh tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BUMDes di Kecamatan Negara. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 9(3). <https://ejournal.undiksha.ac.id>
- Satrio, M. D., Achsin, M., & Handayani, S. R. (2016). Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(1), 59–70. <https://doi.org/10.9744/jak.18.1.59-70>
- Tri Ikyarti, & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131–140. <https://ejournal.unib.ac.id>
- Umar, H. (2004). Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis (Cetakan ke-6). Raja Grafindo Persada.

- Widodo, S. E. (2015). Manajemen pengembangan sumber daya manusia. Pustaka Pelajar.
- Wungow, J. F. (2018). Pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja, pelatihan dan jabatan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(4), 578–583. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21498.2018>
- Yuliani, S., Nadirsyah, & Bakar, U. (2010). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 3(2), 206–220. <https://jurnal.usk.ac.id>
- Zainal. (2016). Pengaruh kemampuan kerja, pengalaman kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Kantor Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. *e-Jurnal Katalogis*, 4(6), 83–90. <http://jurnal.untad.ac.id>.
- , Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- , Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- , Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123).
- , Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- , Pemerintah Provinsi Papua. (2014). Peraturan Gubernur Papua Nomor 4A Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua.
- , Pemerintah Provinsi Papua. (2019). Peraturan Gubernur Papua Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Papua.